

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara)

Helda Nelvia¹, Andi Kusumawati², Retno Fitrianti³

**Program Studi Magister Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin Makassar**



**e-ISSN 2686-0058
p-ISSN 2715-7695**

Informasi Artikel

Tanggal masuk

11 Maret 2023

Tanggal revisi

25 Mei 2023

Tanggal diterima

19 Juli 2023

Kata Kunci:

*Implementasi
Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual¹
Kompetensi Sumber
Daya Manusia²
Kualitas Laporan
Keuangan³*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah bagian keuangan dari 36 Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Morowali Utara. Variabel dalam penelitian ini adalah kebijakan akuntansi berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel bebas serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat. Analisis data menggunakan metode statistik dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa jika penyusunan laporan keuangan semakin sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual maka semakin baik dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang berada dalam organisasi perangkat daerah maka semakin baik dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Abstract: This study aims to analyze the impact of implementation of accrual-based accounting policies and human resources competency to the quality of Morowali Utara local government's financial statement. This research uses quantitative analysis method and using primary data through questionnaire. Respondent of this study were finance departments of 36 local government's office of Kabupaten Morowali Utara. The variables in this study are the implementation of accrual-based accounting policies and human resource competencies as independent variables and the quality of local government financial reports as the dependent variable. Data analysis used statistical methods with multiple regression analysis. The results of the study indicate that the implementation of accrual-based accounting policies has a positive effect on the quality of local government financial reports. It means that if the financial statements is more in line with accrual-based accounting policies, the local government financial reports will be better. On the other hand, human resource competence has a positive effect on the quality of local government financial reports. This indicates that the higher the competence of human resources, the better it is in producing quality local government financial reports.



PENDAHULUAN

Perkembangan bidang akuntansi pemerintahan di Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Dewasa ini, tuntutan terhadap sektor publik mewajibkan lembaga-lembaga publik termasuk pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan Keuangan pemerintah yang berkualitas harus memiliki keempat karakteristik kualitatif yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan yakin karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan menunjukkan sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur.

Nordiawan (2009) mengatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Kebijakan akuntansi pada pemerintah daerah berisi unsur-unsur pokok yang terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran serta pengungkapan. Menurut Suhardjanto & Yulianingtyas (2011), kebijakan akuntansi memiliki sifat yang sangat strategis, oleh karena itu, dalam proses penyusunan instrumen kebijakan akuntansi perlu ada perhatian khusus. Harus ada penjelasan dari setiap dampak atau metode yang akan menjadi pilihan pada bagian pembahasannya. Tujuan adanya kebijakan akuntansi adalah untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Ningtyas & Widyawati, 2015).

Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang memadai belum tentu dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Aparatur yang memahami proses penyusunan dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik akan menghemat waktu pengerjaan laporan keuangan sehingga penyajian laporan keuangan lebih tepat waktu. Semakin cepat laporan keuangan disajikan, semakin baik untuk pengambilan keputusan (Roshanti, dkk. 2014).

Sejak berdirinya pada tahun 2013 sebagai kabupaten termuda pada Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara mulai menunjukkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuktikan oleh tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama empat tahun terakhir. Perkembangan opini tersebut menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dari tahun ke tahun dan sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Morowali Utara untuk semakin meningkatkan kualitas Laporan Keuangan untuk dapat mempertahankan predikat tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, informasi laporan keuangan yang tidak berkualitas akan memberikan peluang terjadinya kekeliruan dan bahkan kecurangan di bidang keuangan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum. Jika terus-menerus terjadi penyimpangan maka akan timbul kerugian keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah seharusnya memperhatikan dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang disajikan agar sesuai dengan regulasi (Haliah, 2013).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang memiliki tingkat eksplanasi asosiatif yaitu penelitian yang didasarkan pada banyaknya objek yang diteliti yang didesain secara spesifik untuk mengetahui objek tertentu atau benar-benar fokus pada sampel yang telah ditentukan, sedangkan Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. OPD ini meliputi dinas, badan, kantor dan bagian. Peneliti juga melakukan wawancara kepada responden yang bersedia diwawancarai mengenai kebijakan akuntansi dan kondisi sumber daya manusia yang ada di satuan kerja responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali Utara. Sedangkan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan kriteria responden adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari PPTK, PPK, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran yang berada di masing-masing OPD di Kabupaten Morowali Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Pengiriman kuisisioner dilakukan dengan cara langsung, pertimbangan yang mendasari dilakukannya survei lapangan adalah rendahnya respon dari sampel dalam penelitian ini dalam memberikan jawaban jika dilakukan *mail survey*.

Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Data-data yang telah dikumpulkan atau yang telah didapatkan kemudian di analisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan analisis jalur (*path analysis*) sebagai berikut:

1. Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Namun karena data yang digunakan adalah data cross section maka uji autokorelasi tidak dilakukan.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji *Kolmogrov - Smirnov*. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka- angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data - data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov- Smirnov lebih dari 0,05 (Ghozali, 2006).

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai toleransi (*tolerance value*) dan lawannya (2) Variance Inflating Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas dari VIF adalah 10 dan *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF 10 dan nilai *tolerance value* 0,1 maka terjadi multikolinearitas, model regresi bebas dari multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai F berada antara 1 dan kurang 10 (Ghozali, 2006).

4. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heterokedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan confidence interval melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan uji Glejser. Dalam uji Glejser, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen, bila terdapat variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual absolut maka terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.

Pengujian Hipotesis

Analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011: 77). Maka rumus regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_1 \dots\dots\dots(1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pola hubungan keempat variabel penelitian, akan diuji tujuh hipotesis. Hipotesis-hipotesis ini dianalisis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011: 77).

Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,509	4,273		2,226	,029
X1	,253	,124	,229	2,040	,045
X2	,267	,128	,227	2,076	,041

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.1 model regresi yang digunakan sebagai berikut.

$$Y1 = 9,509 + 0,229 X1 + 0,227 X2 + e1$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Konstanta sebesar 9,509 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstanta) maka nilai Y (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) adalah sebesar 9,509 satuan.
2. Koefisien variabel implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual (X1) sebesar 0,229 berarti setiap kenaikan implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual sebesar 1%, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,229%.
3. Koefisien variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) sebesar 0,227 berarti setiap kenaikan kompetensi sumber daya manusia 1%, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,227%.

Uji Hipotesis 1: Pengaruh Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada table 4.1, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,045 dan memiliki nilai t-hitung positif 2,040. Hal ini berarti menerima H1, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual lebih kecil dari 0,05.

Uji Hipotesis 2: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada table 4.1, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,041 dan memiliki nilai t-hitung positif 2,076. Hal ini berarti menerima H2, sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pemanfaatan teknologi informasi lebih kecil dari 0,05.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Konsep kebijakan akuntansi yang dijelaskan oleh Hendriksen dalam Suryanto (2019) adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi menurut Arifuddin, dkk dalam Suryanto (2019) yaitu mengatur tata cara penyajian dari laporan keuangan yang ditujukan untuk umum dalam upaya lebih memudahkan dalam membandingkan antara anggaran dengan anggaran lain, periode yang satu dengan periode yang lain maupun antara entitas akuntansi yang satu dengan entitas yang lain. Untuk memperoleh tujuan tersebut, kebijakan ini memutuskan semua pertimbangan dalam upaya penyajian laporan keuangan, standar urutan laporan keuangan dan syarat minimal konten dari laporan keuangan.

Implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebutuhan serta kondisi daerah akan mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Kebijakan akuntansi berbasis akrual yang disusun oleh pemerintah daerah akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan menjadi relevan, andal, transparan dan dapat diterima oleh pengguna.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian statistik (table 4.1) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk

melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompeten harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Berdasarkan teori kontingensi (*contingency theory*) dimana kompetensi sumber daya manusia yang merupakan pihak pembuat laporan keuangan, haruslah memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan, seperti telah mengerti peran dan fungsi dalam pengelolaan keuangan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang semestinya, mendapatkan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dan jika perlu sudah berpengalaman dalam bidang akuntansi sehingga dapat dengan mudah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa berkompetensi yang sportif. Sumber daya manusia yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang keuangan menjadi peyanga utama tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Tjptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Videlis (2004) untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya manusia tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mendukung semua hipotesis yang diajukan, penjelasan rinciannya yaitu sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika penyusunan laporan keuangan semakin sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang berada dalam satuan kerja perangkat daerah maka semakin baik dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Daftar Pustaka

- Alimbudiono, Ria Sandra dan Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*. Skripsi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ariesta, Fadila. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Armando, Gerry. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukittinggi)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Ferdy Van Beest, Geert Braam, dan Suzanne Boelens. 2009. Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. *Nijmegen Center for Economics (NiCE)*. Working Paper 09-108 April.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill, Inc. New York.
- Hevesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. www.osc.state.ny.us.
- Indriasari, Desi. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. SNA Pontianak
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost & Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Oktober. (Vol.3): No. 4: 305-306
- Kadir, A. dan T. Ch. Triwahyuni. 2013. *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Latjandu, Imelda. Litnje Kalangi, Janje J. Tinangon. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud*. Talaud

- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ningtyas, Eka Prawitasari dan Widyawati, Dini. 2015. Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*
- McDaniel. Linda, Roger D Mrtin dan Laureen A. Maines, 2002. Evaluating *Financial Reporting Quality*. Accounting Review. December 1
- Paul Elia Saerang, David, Sintike Mentari Modo dan Agus Tony Poputra. 2016. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD pemerintah kabupaten kepulauan Talaud)*
- Roshanti, A., Sujana, E., & Sinarwati, K. 2014. Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , Volume 2 No: 1*.
- Sekaran, Uma. 2013. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat
- Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*, Vol.14. No.02 Desember 2014, Hal.26-44.
- Septiani, Aditya, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal Yang Sedang Berkembang; Perspektif Teori Pengungkapan*.
- Suhardjanto, D, dan Yulianingtyas, R.R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (1), Hal 30-42
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi. Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Suryanto. 2019. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Agregasi Volume 7-Nomor 2*.
- Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, dan Bernard Wong-On Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

- Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (studi empiris pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah se-sumatra barat)*
- Yudianta, I Gede Agus dan Erawati, Ni Made Adi. 2012. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana. Bali.
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus.* Universitas Muria Kudus.